



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**ORASI KETUA DPR-RI
PADA ACARA FORUM RAPAT KERJA NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) TAHUN 2009**

“DPR RI DAN ASPIRASI MASYARAKAT”

Minggu, 25 Oktober 2009

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat:

- *Saudara Ketua Dewan Penasehat MUI;*
- *Saudara Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP MUI;*
- *Para Peserta Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2009;*
- *Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.*

Pertama-tama marilah terlebih dahulu kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME, yang atas izin dan perkenan-Nya kita dapat bersama-sama berada di tempat ini, untuk memenuhi undangan dari DPP MUI dalam rangka Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2009.

Sebagaimana jadwal acara, Rakernas MUI berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan hari ini merupakan hari kedua, dimana saya selaku Ketua DPR diminta untuk menyampaikan topik yang berjudul : **DPR dan Aspirasi Masyarakat.**

Alhamdulillah, saya selaku Ketua DPR bersyukur dapat mengisi agenda yang telah ditetapkan dan lebih bersyukur lagi karena dapat bertemu dengan para peserta Rakernas, Pimpinan MUI Pusat, MUI Provinsi dari seluruh Indonesia,

Ormas-ormas Islam Tingkat Pusat, Pimpinan Pondok Pesantren dan para undangan lainnya di dalam forum yang sangat terhormat ini.

Hadirin yang berbahagia,

Tema Rakernas adalah “Memperkokoh Hubungan Ulama – Umara untuk Kemajuan Bangsa”, sedangkan topik yang ditetapkan untuk saya sampaikan adalah “DPR dan Aspirasi Masyarakat”. Saya berbahagia, karena dengan topik tersebut saya berkesempatan untuk dapat mensosialisasikan mengenai lembaga DPR, dengan segala fungsi dan wewenangnya, sebagaimana telah diatur di dalam UU yang baru saja disahkan yaitu Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Undang-Undang MD3 maupun Tata Tertib DPR RI mengatur bahwa tiga fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Semua fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan UU dan pelaksanaan APBN.

Untuk melaksanakan berbagai fungsi tersebut, DPR sebagai lembaga representasi rakyat diberi berbagai kewenangan dan hak, baik yang melekat kepada masing-masing anggota maupun yang melekat kepada lembaga. Hak-hak lembaga DPR adalah Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat. Selain itu, Anggota memiliki hak yaitu Hak Mengajukan Pertanyaan, Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang, Hak Memilih dan Dipilih untuk jabatan tertentu pada alat kelengkapan dewan, Hak Imunitas, Hak Protokol, Hak Keuangan dan Administrasi. Berbagai hak tersebut, dapat dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Bagaimana DPR melaksanakan tugas sebagai representasi rakyat, diatur juga secara detail di dalam Tata Tertib DPR RI. Dalam kaitan ini Tata Tertib

mengatur bahwa anggota Dewan dapat membentuk **Rumah Aspirasi**. Rumah Aspirasi berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat.

DPR memang harus terbuka untuk rakyat. DPR harus memberikan kesempatan rakyat untuk menyampaikan berbagai masukan, utamanya dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) baik berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Rakyat perlu dipermudah untuk datang ke DPR.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam kesempatan ini sesuai dengan topik, kami ingin menjelaskan keterkaitan hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya dalam rangka penyerapan aspirasi. Makna keberadaan wakil rakyat mengisyaratkan bahwa tugas konstitusional anggota dewan adalah untuk lebih menyerap aspirasi rakyat, sebagai wujud nyata wakil rakyat yang dipilih langsung. Dalam kerangka kedewanan, hubungan antara anggota dengan konstituen tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme yaitu audiensi dan kunjungan kerja. Perbedaan mendasar dari kedua mekanisme tersebut adalah jika audiensi maka konstituen yang melakukan kunjungan ke DPR RI terkait dengan permasalahan yang ada, baik itu terkait dengan masalah legislasi, masalah anggaran maupun pengawasan. Jika mekanisme hubungan antara anggota Dewan dengan konstituen dilakukan melalui kunjungan kerja, maka anggota Dewanlah yang melakukan kunjungan ke konstituennya. Sistem dan mekanisme kunjungan kerja perlu dipahami dengan sungguh-sungguh bagi setiap anggota DPR RI agar dapat melaksanakan kunjungan kerja tersebut sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tata Tertib DPR.

DPR RI yang kami pimpin saat ini berusaha untuk menyempurnakan sistem Kunjungan Kerja (Kunker) yang lebih komprehensif yang diatur oleh Tata Tertib yang lama dengan maksud agar target dan sasaran kunker dapat dilakukan dengan tepat termasuk dalam sistem penganggarannya. DPR RI sebelumnya, yaitu DPR RI Periode 2004-2009 telah meletakkan dasar bagi pengaturan kunjungan kerja. Di DPR dikenal ada beberapa macam kunjungan kerja, yaitu:

1. Kunjungan Kerja Perseorangan;
2. Kunjungan Kerja Bersama di Daerah Pemilihan;
3. Kunjungan Kerja Komisi;
4. Kunjungan Kerja Gabungan Komisi;
5. Kunjungan Kerja yang Dipimpin oleh Salah Seorang Pimpinan DPR;
6. Kunjungan Kerja Badan Legislasi; dan
7. Kunjungan Kerja Panitia Anggaran;

Kunjungan Kerja Perseorangan merupakan titik berat dari terlaksananya fungsi perwakilan rakyat oleh anggota Dewan. Sebab melalui kunjungan kerja perseorangan, seorang anggota dewan dapat memahami permasalahan yang dihadapi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Hasil dari kunjungan kerja perseorangan tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya melalui mekanisme rapat-rapat dengan pasangan kerja di tiap-tiap komisi. Jika permasalahan yang dihadapi tersebut tidak berada dalam wilayah bahasan dimana anggota dewan tersebut berada, maka anggota dewan yang bersangkutan dapat menitipkan permasalahan tersebut kepada anggota dewan yang berada dalam fraksi yang sama atau kepada anggota dewan lainnya yang berada dalam komisi yang dimaksud.

Kunjungan Kerja Bersama di daerah pemilihan adalah kunjungan kerja yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan yang sama. Filosofi yang mendasari kunjungan bersama di daerah pemilihan ini adalah sesama wakil rakyat dari satu daerah pemilihan meskipun berbeda partai politik, tetap harus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Kunjungan Kerja Komisi pada umumnya dilakukan pada masa reses. Biasanya masing-masing komisi menentukan tujuan kunjungan kerja berdasarkan permasalahan yang terjadi sesuai dengan bidang tugas yang ada pada komisi yang bersangkutan. Kunjungan kerja Komisi biasanya diikuti oleh beberapa anggota Komisi dari daerah pemilih dan fraksi yang bervariasi, dipimpin oleh

Pimpinan Komisi maupun Anggota Komisi yang telah diberikan kewenangan untuk memimpin kunjungan kerja.

Kunjungan Kerja Gabungan Komisi merupakan kunjungan kerja lebih dari satu komisi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan/data/ keterangan yang lebih komprehensif baik dari instansi Pemerintah di daerah maupun masyarakat setempat terkait dengan suatu permasalahan yang terjadi.

Kunjungan Kerja yang dipimpin oleh salah seorang Pimpinan DPR adalah kunjungan kerja yang dilakukan apabila terjadi suatu peristiwa yang mempunyai ruang lingkup nasional, yang perlu penanganan segera. Ini dilakukan pada saat misalnya, terjadi bencana alam atau bencana lain yang memerlukan penanganan segera. Kemudian, **Kunjungan Kerja Badan Legislasi** dilaksanakan dalam rangka mencari masukan dari daerah terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun oleh Badan Legislasi. Selanjutnya, **Kunjungan Kerja Panitia Anggaran** dilaksanakan dalam rangka memantau dana perimbangan di daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah melihat uraian yang saya sampaikan di atas, dalam konteks hubungan antara ulama dan umara di negeri ini dapat kita lihat dalam kerangka hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Umara yang merupakan pimpinan negara, termasuk para wakil rakyat di DPR RI harus senantiasa bekerjasama dengan kaum ulama agar aspirasi-aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi-aspirasi umat Islam dapat terserap dengan baik untuk kemudian ditindaklanjuti pembahasannya dan diputuskan mana yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia. Jangan dilupakan bahwa aspirasi-aspirasi umat Islam hendaknya bersifat *rahmatan lil alamin*, tidak hanya untuk kesejahteraan umat Islam saja, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia . Peran para ulama dalam mengarahkan, membimbing dan menyadarkan umat Islam akan hal tersebut adalah sangat membantu DPR RI dalam melakukan pembuatan kebijakan-kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi antara ulama dan umara harus senantiasa dipelihara.

Salah satu ide saya selaku Ketua DPR RI Periode 2009-2014 adalah diadakannya satu hari khusus untuk rakyat, yang saya usulkan hari itu dinamakan sebagai **“Hari Rakyat”**. Mungkin saja hari tersebut diadakan satu hari pada Masa Sidang di DPR RI . Satu **“Hari Rakyat”** tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak masyarakat yang datang langsung ke Gedung DPR RI guna menyerap aspirasi berbagai kalangan.

Saya juga akan membuat sebuah sistem dimana seluruh pemangku kepentingan dapat mengotrol seluruh aspirasi yg masuk dalam bentuk **“RAKYAT MENGADU, DPR MENJAWAB”**.

Ide saya tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa demokrasi pada hakekatnya mengajarkan agar anggota masyarakat dapat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Memuaskan kehendak rakyat atau kehendak umum merupakan esensi dari fungsi anggota lembaga legislatif selaku wakil rakyat. Rakyat berhak menilai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh para anggota Dewan. Namun demikian, penilaian itu hendaknya realistis dan obyektif.

Dalam hal memperbaiki citra DPR ke depan, salah satu upaya kita adalah melaksanakan training ESQ bagi seluruh anggota secara gratis, serta program pembakalan bagi anggota DPR baru yang akan dilaksanakan di dalam gedung. DPR juga akan membudayakan produk dalam negeri yaitu berpakaian batik setiap hari Jum'at. Alhamdulillah sudah disetujui semua fraksi DPR RI .

Sebagai mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas, DPR mendapat dukungan yang bersifat teknis operasional yaitu dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal harus bekerja secara profesional, mengikuti irama dan dinamika yang dituntut oleh Dewan maupun oleh masyarakat, meningkatkan fungsi dan tugasnya agar dukungan dapat diberikan secara optimal bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan.

Perlu diketahui, dalam menampung aspirasi rakyat, Dewan dibantu oleh unit kerja Sekretariat Jenderal yang menangani pengaduan masyarakat, menganalisa dan mengolahnya untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan yang ada. Sekretariat Jenderal juga memiliki unit kerja yang

mengatur delegasi masyarakat yang datang ke DPR dan menyalurkannya kepada Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan bidang dan materi yang akan disampaikan. Dengan demikian, usulan tentang **“Hari Rakyat”** *Insya Allah* akan dapat terwujud. Untuk itu, kami mohon doa dari para ulama yang hadir dalam forum ini.

Hadirin yang berbahagia,

Kami memandang tugas kepemimpinan di lembaga DPR ini, merupakan sebuah amanat yang menuntut tanggungjawab yang harus senantiasa kami jaga dan tunaikan seoptimal mungkin. Selaku ketua DPR-RI, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh anggota dewan untuk senantiasa mengedepankan disiplin dan etika politik yang baik di dalam menjalankan tugas dengan tetap mengimplementasikan prinsip demokrasi **“checks and balances”**.

Kita tidak dapat menutup mata dengan hadirnya berbagai penilaian masyarakat atas citra dan kinerja DPR yang selama ini belum dianggap memuaskan. DPR masih dianggap sebagai lembaga yang belum sepenuhnya mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Disiplin dan kinerja para Anggota Dewan juga memperoleh sorotan tajam. DPR juga dinilai belum mampu secara optimal menjalankan fungsi-fungsi dan perannya sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengontrol kebijakan pemerintahan secara efektif.

Dalam hal ini, tentu saja kami tidak anti-kritik. Kami menyadari bahwa DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat, maka Gedung DPR adalah Rumah Rakyat, dimana kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari berbagai kalangan. Kami akan senantiasa berempati pada permasalahan-permasalahan rakyat, dan berupaya memperjuangkannya seoptimal mungkin. Kami mengharapkan **kritik-konstruktif** dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para ulama, agar kinerja kami sebagai wakil rakyat dapat kami tunaikan secara optimal.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam forum Rapat Kerja MUI Tahun 2009. Mudah-mudahan Rakernas ini berjalan dengan sukses dan menghasilkan keputusan yang sangat bermanfaat, tidak saja untuk memperkokoh hubungan Ulama dan Umara tetapi juga untuk kemajuan bangsa.

Sekian. Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamithoriq,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 25 Oktober 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



H. MARZUKI ALIE